



Judul : MKD Didesak Tindaklanjuti Laporan MAKI soal Setnov
Tanggal : Senin, 20 Maret 2017
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

MKD Didesak Tindaklanjuti Laporan MAKI soal Setnov

JAKARTA- Mahkamah Ke-hormatan Dewan (MKD) DPR didesak menindaklanjuti laporan yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Tujuannya, untuk tetap menjaga marwah dan kredibilitas lembaga para wakil rakyat di Senayan.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, karena pembe-ritaan kasus e-KTP yang sangat luas, MKD harus segera mem-beri respons untuk tetap men-jaga marwah dan kredibilitas DPR. "MKD dibentuk sebagai penjaga public accountabil-ity DPR," kata Siti saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (19/3).

Karena itu, sambung Siti. MKD perlu merespons pembe-ritaan yang disampaikan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan memanggil satu persatu yang tersebut di

pemberitaan.

Hal itu, lanjutnya, dianggap penting karena MKD memiliki peran penting untuk menunjukkan marwah institusi legislatif. Jika MKD tak bertindak, tak me-nutup kemungkinan publik akan bergerak dan menuntut. Tak terkecuali terhadap Novanto.

Jika memang terlibat, tambah-nya, Novanto seharusnya mem-pertanggungjawabkan perbu-tannya sebelum akhirnya dip-roses lebih jauh. Hal itu sebagai tindak lanjut konsep Revolusi Mental yang digaungkan pe-merintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tak hanya menjaga integritas di kalangan pejabat ekse-kutif, tapi juga legislatif. "Indo-nesia sudah saatnya mengede-pankan budaya malu dan mun-dur bila pejabat publik melang-gar hukum atau melakukan tindak korupsi," kata Siti.

Sebelumnya, Ketua DPR RI,

Setya Novanto nampaknya menjadi langganan dilaporkan ke Mahkamah Kohormatan De-wan (MKD). Pasca kasus 'Papa Minta Saham' kini politisi Partai Golkar itu diduga melanggar kode etik lantaran berbohong soal kasus e-KTP. Alhasil, nama Setnov (panggilan Setya No-vanto) kini telah kembali ter-cantum di lembaga etik para wakil rakyat Senayan atas lapo-ran yang diajukan oleh Masya-rakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Kamis (16/3).

"Setnov diduga berbohong ti-dak mengenal dua mantan pe-jabat Kemendagri (Kemen-terian Dalam Negeri, red), seka-ligus terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik, yaitu Irman dan Sugiharto," ungkap Boyamin Saiman, Koordinator MAKI kepada war-tawan di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin. (aen)